

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004
- Bambang Waluyo. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Strategi dan Optimalisasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ermansjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Firdaus. *Pekanbaru Madani*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018.
- Freddy Harris dan Leny Helena. *Notaris Indonesia*. Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017.
- Ghansham Anand. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Habib Adjie. 2017. *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Haryatmoko. *Etika Publik*. Kanisius, Yogyakarta, 2015.
- H. Salim HS. dan H. Abdullah. *Perancangan Kontrak dan MOU*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- IGM Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*. Total Media, Yogyakarta, 2009.
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi (Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*. Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. Dampak Sosial Korupsi. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepuyan Bidang Pencegahan, Jakarta, 2016.
- Mahrus Ali. Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi. UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Mardjono Reksodiputro. Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan. Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi). Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. Strategi dan Teknik Korupsi. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta, 1986.
- Sumartana. Etika dan Penanggulangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Era Reformasi. Aditya Media, Yogyakarta, 1999.
- Tan Thong Kie. Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Cetakan Kedua. PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2011.
- Taufik Makarao. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Teguh Samudera. Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Edisi Pertama. Alumni, Bandung, 2004.
- Tresna, R. Komentari HIR. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Wawan Tunggal Alam. Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari. Milenia Populer, Jakarta, 2001

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan kategori Daerah

3. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Nomor 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg

Putusan PN SEMARANG Nomor 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Tahun 2016

Putusan No. 26/Pid.B/2014/PN.Yk

4. Website

<https://21ngafifi.wordpress.com/2010/10/25/beberapa-teori-dasar-tentang-korupsi/>

<https://bukanktpjakarta.wordpress.com/2017/12/21/notaris-dan-ppat-banyak-yang-diseret-seret-melanggar-uu-tipikor-dalam-hubungannya-dengan-pengikatan-jaminan-di-bank-bumn/>

<http://didikfarkhan.com/index.php/catat/116-mungkinkah-notaris-korupsi>

<https://kbbi.web.id/>

<https://lapor.go.id/tentang>

<https://radarsemarang.com/2018/03/09/notaris-pemberi-suap-diperiksa/>

<https://www.kompasiana.com/elleonoraellen/59f3a4e0ed4ed6713a6299c2/kkn-korupsi-kolusi-nepotisme-merupakan-benalu-sosial>

5. Jurnal

Entin Sholikhah dan Jawade Hafidz. "*Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*". Jurnal Akta Vol 4 No 1, 2017.

Hardijan Rusli. "*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*", Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, 2006.

Ifrani. "*Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*", Al'Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, 2017.

Maryanto. "*Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*". Jurnal Imiah CIVIS, Volume II, No 2, Juli 2012, 2012.

6. Lain-Lain

Eddy O.S. Hiariej, "*Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi, "Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada"*", Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 30 Januari 2012 di Yogyakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi. "*Korupsi dan Integritas, Materi Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi*", Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.